

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Asofa, Burhan, 2000, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Harahap, M.Yahya 2005, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harsono, Boedi, 2007, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya*, Jilid 1, Hukum Tanah Nasional, Djambatan, Jakarta.
- Hartanto, J. Andy, 2009, *Problematisa Hukum Jual Beli Tanah Belum Bersertifikat*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta.
- HR, Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Huda, Ni' Matul, 2013, *Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Perdebatan Konstitusi dan Perundang-undangan di Indonesia*, Nusa Media, Bandung.
- Ishaq, H., 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Media Group, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1988, *Perundang-undangan Agraria Yogyakarta*. Liberty, Yogyakarta.
- _____, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Marhaendra, Gede, 2015, *Prinsip dan Teknik Penyusunan Keputusan Administrasi Pemerintahan*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muchsin dan Imam Koeswahyono, dkk, 2010, *Hukum Agraria Indonesia Dalam Perspektif Sejarah*, Refika Aditama, Bandung.

- Nazir, Mohammad, 1988, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Parlindungan, A. P., 1997, *Pendaftaran Tanah di Indonesia Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor:24 Tahun 1997*, CV Mandar Maju, Bandung.
- Perangin, Effendi, 1986, *Hukum Agraria Indonesia Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Radjawali, Jakarta.
- Poerwokusumo, Soedarisman, 1984, *Daerah Istimewa Yogyakarta*, Gadjahmada University Press, Yogyakarta.
- Saebani, Beni Achmad, 2008, *Metode Peneltian Hukum*, CV Pustaka Setia, Bandung.
- Saleh, H. Aminuddin, dkk., 2010, *Hukum Agraria*, Cetakan Pertama, As Publishing, Makassar.
- Santoso, Urip, 2005, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta.
- , 2010. *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta.
- , 2013, *Hukum Agraria*, Kencana, Jakarta.
- Sasangka, Hari dan Ahmad Rifai, 2005, *Perbandingan HIR dan RGB*, Mandar Maju, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- , Soerjono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, cetakan III, UI Press, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, UI Press, Jakarta.
- Soemardjan, Selo, 2009, *Perubahan Sosial di Yogyakarta*, Komunitas Bambu, Jakarta.
- Soerojo, Irawan, 2002, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arloka, Surabaya.
- Subekti, R., 2005, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakata.
- Sujamto, 1988, *Daerah Istimewa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.

Sumardjono, Maria S.W., 2006, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Kompas, Jakarta.

Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, 1979, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik*, Mandar Maju, Bandung.

Ridwan Syahrani, 2009, *Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, PT. CitraAditya Bakti, Bandung.hlm.80.

Widodo, Tri, 2002, *Hukum Pertanahan Dalam Perspektif Otonomi Daerah*, Navila, Yogyakarta.

B. JURNAL

Suyitno, “Perkembangan Keistimewaan Urusan Agraria (Tanah) di Daerah Istimewa Yogyakarta”, *Mimbar Hukum*, Volume VIII, Nomor 31, 1998.

Ni Matul Huda, “Beberapa Kendala dalam Penyelesaian Status Hukum Tanah Bekas Swapraja di Daerah Istimewa Yogyakarta”, *Jurnal Hukum*, Volume 7, Nomor 13, 2000.

C. UNDANG-UNDANG/PERATURAN PERUNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1954 tentang Hak Atas Tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1954 tentang Pelaksanaan “ Putusan” Desa Mengenai Peralihan Hak Andarbe (erfelijk individueel bezitsrecht) dari Kalurahan dan Hak Anganggo Turun Temurun Atas Tanah (eferlijk individueel gebruiksrecht) dan Perubahan Jenis Tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 1954 tentang Peralihan Hak Milik Perseorangan Turun Temurun Atas Tanah (eferlijk individueel bezitsrecht)

D. TESIS/DISERTASI

Hamid S. Attamimi, “Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara”, *Disertasi*, Program Studi Doktor, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1990.

Nasution, Hafni Cholida, “Perlindungan Hukum Pembeli Hak Atas Tanah Berdasarkan Alas Hak Yang Berasal Dari Surat Keterangan Camat (Analisis Kasus PTUN Nomor: 72/G.TUN/2005/PTUN-MDN)”, *Tesis*, Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2013.

Subekti, Cipto “Akibat Hukum Surat Pernyataan Pernyataan Penguasaan Fisik bidang Tanah (Studi Kasus Jual Beli Tanah di Desa Muara Singan dan Desa Bipak Kali Kecamatan Gunung Bintang Awal Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah)”, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2013.

Suparyono, Edy, “ Kutipan Buku Letter C Sebagai Alat Bukti Untuk Memperoleh Hak Atas Tanah di Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur”, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.

Westri, Yuridiska Rananda, “Eksistensi Camat Sebagai Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sementara Dalam Proses Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli di Kecamatan Bangutapan, Kabupaten Bantul”, *Tesis*, Program Studi Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2015.

E. ARSIP

Suyitno, 1998, *Sejarah Tanah Kas Desa*, Arsip Biro Hukum Sekretariat Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta.

F. INTERNET

Bantuan Hukum, “Alas Hak Atas Tanah”, <http://blogvisnu.blogspot.co.id/2014/12/alas-hak-merupakan-alatbukti.html?m=1>, diakses tanggal 2 Januari 2018 pukul 18.15 WIB

Law File, “Alat Bukti Sumpah”, <http://lawfile.blogspot.com/2011/07/alat-bukti-sumpah.html>, diakses pada tanggal 22 Juni 2018, Jam 23.15 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Pengertian Kompeni”,
<https://kbbi.web.id/kompeni>, diakses tanggal 25 Juni, Jam 21.21 WIB

Tifiacerdikia, “Pengertian Landerform”,
<https://tifiacerdikia.com/lecturer/lecturer-2/hukumagraria/pengertian-landreform/>, diakses tanggal 25 Juni 2018, jam 22.17 WIB

Wikipedia Ensiklopedia Bebas, “Pengertian Keraton”,
<https://id.wikipedia.org/wiki/Keraton>, diakses pada tanggal 25 Juni 2018, jam 22.30 WIB.

Amrullahsiddik, “Alat Bukti Hukum Acara Perdata”,
<https://amrullahsidik.wordpress.com/2015/02/11/alat-bukti-dalam-hukum-acara-perdata/>, diakses tanggal 25 Juni 23.10